

→ RINGKASAN EKSEKUTIF

# MENANGKAL MISINFORMASI KRISIS IKLIM DI INDONESIA



DIDUKUNG OLEH  
**APNIC FOUNDATION,**  
MELALUI INFORMATION SOCIETY INNOVATION FUND (ISIF ASIA)



## **PENULIS**

- NOVI KURNIA
- TREVILIANA EKA PUTRI
- AMELINDA PANDU KUSUMANINGTYAS
- FIRYA QURRATU'AIN ABISONO
- ALFREDO PUTRAWIDJOYO
- MUHAMMAD PERDANA SASMITA-JATI KARIM
- BHREDIPTA CRESTI SOCARANA

## **PENYUNTING**

- NOVI KURNIA
- FIRYA QURRATU'AIN ABISONO

## **PROOFREADER**

- SYAIFA TANIA
- MUHAMMAD HAFIZ NOER

## **DESAIN SAMPUL**

- RIAWAN HANIF ALIFADECYA

## **TATA LETAK & GRAFIS**

- FIRYA QURRATU'AIN ABISONO
- RIAWAN HANIF ALIFADECYA



## → RINGKASAN EKSEKUTIF



Misinformasi merupakan salah satu tantangan yang paling banyak ditemukan dalam perkembangan teknologi digital dewasa ini. Dari beragam jenis misinformasi yang beredar sangat cepat di Indonesia, misinformasi mengenai krisis iklim sering dianggap sebagai misinformasi yang tidak 'berbahaya' sekaligus risikonya rendah dan tidak langsung terlihat—jika dibandingkan misalnya dengan misinformasi terkait pandemi COVID-19, maupun misinformasi politik yang risikonya terlihat baik di bidang kesehatan maupun politik. Padahal, misinformasi krisis iklim berpotensi untuk memicu kerusakan lingkungan serta perubahan penting ekosistem bumi yang akan merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Penelitian yang berjudul “Menangkal Misinformasi Krisis Iklim di Indonesia” dilakukan berdasarkan keprihatinan terhadap persebaran misinformasi iklim yang semakin banyak ditemukan, namun di sisi lain, perhatian untuk menangkalnya masih cukup terbatas. Hal ini semakin diperparah dengan temuan riset berbasis survei yang dilakukan oleh YouGov yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah climate-change deniers (penyangkal krisis iklim) tertinggi di dunia serta berpotensi tinggi untuk mempercayai misinformasi krisis iklim sekaligus menyebarkannya. Misinformasi krisis iklim patut diperhatikan karena dua hal. Pertama, misinformasi krisis iklim membuat orang ragu atau semakin ragu terhadap konsensus krisis iklim. Kedua, misinformasi krisis iklim membuat orang tidak percaya atau ragu terhadap sains yang mempelajari krisis iklim. Akibatnya, misinformasi krisis iklim memiliki peran langsung dalam menopang krisis iklim dan menghambat aksi atau kebijakan krisis iklim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan penting. Pertama, bagaimana pemahaman, pola konsumsi dan kemampuan literasi digital pengguna internet Indonesia terkait misinformasi krisis iklim? Kedua, bagaimana ragam misinformasi krisis iklim yang ditemukan dan diverifikasi oleh beragam sumber cek fakta terpercaya di Indonesia?

Pertanyaan pertama dijawab dengan melakukan survei daring yang dilakukan pada bulan Agustus dan September 2023 terhadap 2.401 responden. Komposisi responden mayoritas adalah

perempuan (63.2%), lajang (56.9%), lulusan sarjana (34.7%) dan Gen Z (51,6%). Beberapa temuan penting riset ini adalah: (1) 24.2% responden percaya bahwa “krisis iklim adalah rekayasa buatan yang diciptakan oleh penguasa global” yang artinya mereka percaya pada teori konspirasi global, (2) sepertiga responden (21.5% setuju dan 11% sangat setuju) memiliki persepsi bahwa krisis iklim disebabkan oleh semakin banyak manusia yang melakukan maksiat dan tidak mematuhi agamanya, (3) lebih dari 25% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa ilmuwan yang meneliti krisis iklim dikendalikan oleh kaum elit, (4) lebih dari separuh responden (63.5%) menjawab bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama mereka terkait topik krisis iklim, (5) lebih dari seperempat responden, 19.9% setuju dan 6.6% sangat setuju, dengan pernyataan bahwa upaya pemerintah mengurangi emisi bahan bakar bertentangan dengan cara hidup demokratis, (6) hampir separuh responden (47.1%) menyatakan bahwa mereka pernah mencari informasi terkait krisis iklim, namun dengan intensitas yang tidak terlalu sering, (7) hampir seluruh responden (98%) mengaku pernah menemukan konten bermuatan misinformasi krisis iklim di media sosial, (8) mayoritas responden, hingga nyaris mencapai 74% responden mengaku percaya diri dengan kemampuan mengidentifikasi misinformasi yang berkaitan dengan krisis iklim di media sosial, (9) lebih dari separuh responden (62.3%) menyatakan bahwa respon yang diberikan berhenti pada tahapan memverifikasi kebenaran informasi dan hanya sebagian kecil responden (20%) membuat konten kontra narasi untuk melawan misinformasi krisis iklim.

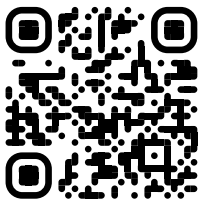
Pertanyaan kedua dijawab dengan melakukan analisis konten terhadap 123 konten misinformasi iklim (krisis iklim, pemanasan global, dan bencana alam) yang didapatkan dari empat laman website pengecekan fakta yakni: [www.cekfakta.com](http://www.cekfakta.com), [www.turnbackhoax.id](http://www.turnbackhoax.id), [www.jalahoaks.jakarta.go.id](http://www.jalahoaks.jakarta.go.id), dan [www.saberhoaks.jabarprov.go.id](http://www.saberhoaks.jabarprov.go.id). Beberapa temuan analisis konten ini adalah: (1) terdapat tujuh jenis konten misinformasi krisis iklim yang ditemukan yakni: konten satir/parodi, koneksi yang salah, konten yang menyesatkan, konteks yang salah, konten impostor, konten yang dimanipulasi, dan konten palsu, (2) konten misinformasi iklim ternyata mempunyai tiga relevansi tema utama yakni agama, politik, dan climate-alarmism (alarmisme iklim), (3) Konten misinformasi seringkali mencatut nama tokoh atau sumber otoritas terkait dengan isu yang beredar tentang informasi palsu tersebut, (4) Keempat laman cek fakta yang diteliti tidak banyak menemukan misinformasi iklim jika dibandingkan dengan isu lain. Meskipun demikian, misinformasi krisis iklim seringkali berhubungan dengan misinformasi politik, (5) literasi dan kemampuan berpikir kritis penting untuk mencegah persebaran misinformasi iklim.

Penelitian ini menawarkan rekomendasi yang sifatnya akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian mengenai pemetaan kebijakan pencegahan dan penanganan misinformasi lingkungan yang tak hanya meliputi misinformasi krisis iklim, namun juga misinformasi mengenai iklim secara umum, kebencanaan, maupun pemanasan global. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pencegahan dan penanganan misinformasi

krisis iklim yang melibatkan beragam pemangku kepentingan yakni pemerintah, institusi pendidikan, beragam komunitas terkait (Lingkungan Hidup, Cek Fakta, Literasi Digital, dan komunitas lain yang relevan), tokoh agama dan masyarakat, social influencer, dan pengguna internet. Beragam program yang bisa dilakukan untuk pencegahan misinformasi krisis iklim antara lain adalah cek fakta, media monitoring, penyediaan informasi krisis iklim yang memadai, penelitian, dan literasi. Sedangkan beragam program penanganan antara lain adalah mekanisme penyediaan laporan misinformasi krisis iklim maupun pembentukan satuan tugas (satgas) kolaboratif penanganan misinformasi krisis iklim. Program-program bisa dilakukan masing-masing pemangku kepentingan maupun secara kolaboratif.

**Kata kunci: Misinformasi, Krisis iklim, Survei, Analisis konten**





**CENTER FOR DIGITAL SOCIETY**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
RUANG BC 201-202, GEDUNG BC LANTAI 2,  
JL. SOCIO YUSTISIA 1  
BULAKSUMUR, YOGYAKARTA, 55281, INDONESIA

GO-WORK JAKARTA  
LANTAI 38  
MILLENNIUM CENTENNIAL CENTER,  
JL. JENDERAL SUDIRMAN  
NO.KAV. 25, JAKARTA PUSAT

TELEPON : (0274) 563362, Ext. 116 | +62 838 6969 8181  
EMAIL : [cfds.fisipol@ugm.ac.id](mailto:cfds.fisipol@ugm.ac.id)  
SITUS WEB : [digitalsociety.id](http://digitalsociety.id)

 [facebook.com/cfdsugm](https://facebook.com/cfdsugm)

 Center for Digital Society (CfDS)

 [cfds\\_ugm](https://instagram.com/cfds_ugm)

 [cfds\\_ugm](https://soundcloud.com/cfds_ugm)

 [@cfds\\_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)

 [CfDS UGM](https://youtube.com/CfDS_UGM)

